I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Pemerintahan Daerah dalam pasal 56 dan pasal 119 serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilukada perlu dilakukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal, dengan pemilukada terbuka kemungkinan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional karena semakin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan/ atau daerah.

Kepala daerah atau gubernur merupakan kekuasaan tertinggi di daerah, yang berarti segala keputusan seperti kebijakan dan peraturan adalah tugas dan wewenang yang dimiliki oleh kepala daerah hal ini ditegaskan pada UU No. 32 tahun 2004 pasal 25. Oleh sebab itu, penting untuk memilih kepala daerah yang cerdas dan kreatif serta mengetahui kebutuhan rakyatnya agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan sehingga rakyat yang dikorbankan.

Pemilihan kepala daerah beserta wakil kepala daerah harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh UU No. 32 tahun 2004 pasal 58, ada 16 kriteria yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah dan wakilnya. Pada pasal tersebut cukup jelas diterangkan tentang kriteria pemimpin yang layak untuk dipilih oleh rakyatnya dan dapat mensejahterakan kehidupan daerahnya. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa umur minimal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu 30 tahun. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan untuk para pemuda dapat berkarya dalam membangun pemerintahan daerah yang lebih maju lagi. Namun dengan kenyataan tersebut, bahwa hal itu juga akan menimbulkan persaingan yang kuat antar calon kepala daerah. Oleh sebab itu, peraturan tentang kampanye pun telah diatur sehingga akan meminimalisir kecurangan yang terjadi.

Pada UU No. 32 tahun 2004 pasal 75 – 85 tentang kampanye sangat jelas diterangkan tentang sistem kampanye yang benar, hingga konsekuensi pelanggaran jika terdapat kecurangan dalam berkampanye. Kampanye yang menggunakan media elektronik dan media cetak, para pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki hak yang sama untuk dapat berkampanye pada media tersebut. Pihak media sebagai alat berkampanye pun harus netral, artinya semua media baik elektronik atau cetak tidak boleh memberatkan pasangan calon kepala daerah yang lain dan apabila hal tersebut terjadi itu berarti media tersebut melakukan pelanggaran kampanye yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Untuk memenangkan pesta demokrasi pada tingkat daerah atau pemilukada, setiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki strategi berkampanye yang berbeda. Menurut *Jimly Asshiddiqie* pada *Tribunnews.com* yang diposting pada 30 Maret 2014 dan diakses pada 19 November 2014 menyatakan “kampanye terdiri dari tiga jenis saat pemilu yaitu kampanye positif (*positive campaign*), kampanye negatif (*negative campaign*), dan kampanye hitam (*black campaign*)”. Ketiga jenis kampanye tersebut merupakan strategi yang sering digunakan oleh para calon pemimpin, tidak terkecuali pemilihan kepala daerah yang telah berlangsung di Provinsi Lampung pada 9 April 2014. Para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah memberitahukan visi dan misi mereka saat kampanye yang diatur sedemikian rupa oleh para tim sukses masing-masing calon. Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh para tim sukses tersebut beragam, dengan tujuan memenagkan calon kepala daerah yang mereka usung, sampai pada penggunaan kampanye hitam pun mereka lakukan agar tujuan tersebut tercapai.

Pengertian *Black Campaign* menurut Apriatni EP yang diunggah ke situs <http://www.perludem.org> pada senin 7 Mei 2012 dan diakses pada tanggal 23 februari 2015 adalah:

actions, such as putting forward dishonesty in reporting the candidates as well as politic parties, making blasphemy, and making bad appearance of their political opponents, are actions that indicate lack of moral consciousness. Jadi, kampanye hitam, sederhananya, merupakan segala bentuk informasi yang dikemukakan dalam masa kampanye untuk meyakinkan para pemilih, berisi muatan yang merugikan kepentingan kandidat atau peserta pemilu tertentu.

Black Campaign atau kampanye hitam di Indonesia terbaru terjadi pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu pilpers 9 juli 2014. Pada saat itu para calon presiden dan wakil presiden dihadapkan pada isu-isu yang saling menjatuhkan. Isu-isu tersebut sengaja dilakukan oleh para oknum pendukung calon presiden dan wakil presiden untuk menjatuhkan pasangan lawan mainnya. Media sosial sangat berpengaruh dalam penyebaran isu negatif tersebut, misalnya pada twitter, facebook, dan lain sebagainya. Dengan isu yang menjatuhkan lawan mainnya yang diposting pada media social akan mengundang antusiasme masyarakat untuk berkomentar, memberikan tanggapan, bahkan ikut memprovokasi masyarakat yang lain agar percaya terhadap isu tersebut. Isu yang beredar terkait dengan masalah agama calon presiden, masa lalu calon presiden hingga kasus-kasus hukum yang melibatkan calon presiden. Diposting pada media elektronik seperti pertelevisian di Indonesia semakin membuat kampanye hitam diantara pasangan calon presiden dan wakil presiden sangat kuat, hingga para pasangan calon presiden tersebut mengklarifikasi isu-isu yang beredar. Pada akhirnya masyarakat yang menilai dan memilih calon pemimpin yang terbaik untuk memimpin negeri ini.

Bersamaan dengan hal tersebut *Black Campaign* atau kampanye hitam juga menimpa calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Lampung yang sebelumnya sudah terlaksana. Pemilihan gubernur di provinsi ini terdiri dari empat pasang calon yaitu Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, Berlian Tihang-Mukhlis Basri, M. Alzier Dianis Thabranie- Lukman Hakim dan pasangan Herman- Zainudin Hasan.

Persaingan yang ketat diantara keempat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Lampung membuat kampanye mereka semakin terasa karena masing-masing calon ingin dipilih oleh rakyat hingga terlihat adanya kampanye hitam. Misalnya seperti yang dikemukakan oleh situs *Jpnn.com* pada pasangan Ridho Ficardo-Bachtiar Basri mendapat isu bahwa “usia yang terlalu muda belum pantas untuk memimpin provinsi Lampung ditambah dengan belum pernah menjabat di pemerintahan dan dinilai masih 'hijau' di dunia politik.” Padahal Ridho merupakan Ketua Partai Demokrat Lampung, sementara Bachtiar menjabat sebagai Bupati Tulangbawang Barat.

Kampanye yang melanggar tata tertib pemilu tersebut memang dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat Kampung Lingsuh Rajabasa Jaya Bandar Lampung. Ketika peneliti mewawancarai salah satu masyarakat kampung tersebut yaitu bapak agus beliau berpendapat “isu-isu yang beredar mengenai calon gubernur kita memang banyak terlebih lagi yang negatif karena berita tersebut tersebar dari mulut ke mulut setiap warga yang berkumpul tanpa tahu sumber informasi atau kebenaran dari beritanya”. Pendapat tersebut semakin diperkuat oleh salah satu aparat kampung Lingsuh dengan mengatakan “banyak informasi yang tersebar dimasyarakat memang, tapi mereka tidak pernah tahu informasi yang mereka dapat dari mana dan kebenarannya seperti apa ,hanya tahu dari internet bahkan orang lewat saja”.

Masyarakat memang belum merasakan langsung dampak dari kampanye hitam atau *Black Campaign* tersebut. Tetapi dengan perlahan rumors-rumors negatif yang tersebar mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap calon

pemimpin yang akan mereka pilih. Fenomena tersebut dapat terlihat dari beberapa pendapat masyarakat yang menyatakan ragu-ragu saat akan memilih pemimpin mana yang mereka dapat percaya untuk dapat memimpin Provinsi Lampung. Karena *Black Campaign* atau kampanye hitam tidak hanya dapat merusak citra calon pemimpin tetapi juga dapat merubah pandangan masyarakat terhadap dunia perpolitikan di Indonesia menjadi lebih negatif. Sikap masyarakat terhadap *Black Campaign* atau kampanye hitam pasca pemilihan kepala daerah adalah respon/tanggapan yang diberikan masyarakat berupa penilaian negatif (menolak) atau positif (menerima) terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan sebelum pemilihan kepala daerah berlangsung. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh permasalahan tersebut dengan suatu penelitian yang berjudul: “*Sikap Masyarakat Terhadap Black Campaign Pasca Pemilihan Kepala Daerah di Kampung Lingsuh Rajabasa Jaya Bandar Lampung Tahun 2015*”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sikap masyarakat terhadap *Black Campaign* pasca pemilihan kepala daerah.
2. Respon atau tanggapan yang diberikan masyarakat terhadap *Black Campaign*.
3. Budaya masyarakat menerima atau tidak terhadap *Black Campaign*.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka diperlukan adanya pembatasan masalah yang jelas agar penelitian ini lebih terarah pada tujuan yang ingin dituangkan pada penelitian ini. Oleh sebab itu peneliti membatasi permasalahan hanya pada sikap masyarakat terhadap *Black Campaign Pasca* pemilihan Kepala Daerah (studi kasus di Kampung Lingsuh Rajabasa Jaya Bandar Lampung Tahun 2015).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, permasalahan pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimanakah sikap masyarakat terhadap *Black Campaign Pasca* pemilihan Kepala Daerah (studi kasus di Kampung Lingsuh Rajabasa Jaya Bandar Lampung Tahun 2015)?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sikap masyarakat terhadap *Black Campaign Pasca* pemilihan Kepala Daerah (studi kasus di Kampung Lingsuh Rajabasa Jaya Bandar Lampung tahun 2015).

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secra teoritis, penelitian ini berguna untuk memperkaya dan mengembangkan konsep teori dan ilmu pendidikan khususnya dalam wilayah kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta dalam kawasan ilmu politik dan hukum.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis dalam penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai:

1. Sebagai masukan untuk masyarakat bagaimana sebaiknya menyikapi kegiatan *Black Campaign* atau kampanye hitam pada pemilihan Kepala Daerah.
2. Sebagai sarana refleksi bagi para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar memegang teguh prinsip LUBER JURDIL dalam Pemilihan Kepala Dareah.
3. Sebagai sarana refleksi bagi para calon pemimpin dan masyarakat agar menghindari kegiatan *Black Campaign* (kampanye hitam), karena kegiatan tersebut telah menyimpang dari prinsip Pemilu.
4. Sebagai bahan pedoman perbaikan sistem Pemilukada, khususnya dalam lingkup Kampung Lingsuh Rajabasa Jaya Bandar Lampung

5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan serta memperkaya khasanah ilmu pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat dan siswa.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini berada dalam lingkup ilmu pendidikan khususnya dalam wilayah kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan kontribusinya untuk membentuk warga Negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dalam kebudayaan politik, dan kenegaraan.

2. Ruang Lingkup Objek

Objek dalam penelitian ini adalah sikap masyarakat terhadap *Black Campaign* Pasca pemilihan Kepala Daerah (studi kasus di Kampung Lingsuh Rajabasa Jaya Bandar Lampung Taun 2015).

3. Ruang Lingkup Subjek

Subyek dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang bertempat tinggal di Kampung Lingsuh Rajabasa Jaya Bandar Lampung.

4. Ruang Ligkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah Kampung Lingsuh Rajabasa Jaya Bandar Lampung.

5. Ruang Lingkup Waktu

Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya Surat Izin Penelitian Pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sampai selesainya penelitian ini.